

# **IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK PADA KOPERASI**

**(STUDI KASUS PADA KPRI “KEBAK” PURWOREJO)**

Oleh : Siti Isnainiyah dan Supriono

## **I. PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Dalam rangka mewujudkan cita-cita perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, maka satu badan usaha yang cocok adalah koperasi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian menyebutkan bahwa “Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”. Pengertian tersebut menunjukkan bahwa koperasi adalah badan hukum yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Jadi pada dasarnya koperasi merupakan salah satu badan usaha yang sekaligus merupakan pranata ekonomi Indonesia yang umumnya didirikan dengan harapan dapat mengatasi persoalan anggotanya. Untuk melaksanakan kegiatannya dan untuk memenuhi kebutuhan operasinya, koperasi membutuhkan dana yang diperoleh dari simpanan wajib anggota. Oleh karena itu diperlukan penyusunan laporan keuangan untuk mengetahui aset, kewajiban serta ekuitas yang ada di koperasi.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) menjelaskan bagaimana penyajian laporan keuangan serta komponen-komponen apa saja yang harus dicantumkan dalam masing-masing laporan keuangan. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengesahkan SAK ETAP yang lebih sederhana dibandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no.1 tentang penyajian laporan keuangan. Beberapa komponen PSAK yang dihilangkan dalam SAK ETAP antara lain: pembuatan laporan keuangan konsolidasi, laporan arus kas badan usaha hanya menggunakan metode tidak

langsung, sedangkan PSAK memberikan pilihan berupa metode langsung dan tidak langsung.

Menurut SAK ETAP (2009:1) Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik, namun entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP

SAK ETAP diberlakukan secara efektif mulai 1 Januari 2011 namun penerapan diperbolehkan lebih awal mulai 1 Januari 2010. Dengan adanya SAK ETAP ini, maka badan usaha seperti koperasi dapat menyajikan informasi yang relevan kepada para pengguna laporan keuangannya, baik internal maupun eksternal.

Berkaitan dengan implementasi SAK ETAP penulis melakukan penelitian salah satu koperasi yang ada di kecamatan Kemiri Kabupaten Purworejo. Koperasi tersebut adalah KPRI KEBAK, dikarenakan laporan keuangan yang dilaporkan KPRI “KEBAK” belum sesuai dengan SAK ETAP. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh ketua dan bendahara KPRI “KEBAK” tentang cara pengungkapan laporan keuangan, sehingga informasi yang didapat perihal laporan keuangan sangat kurang. Sebagai contoh, aset yang dimiliki oleh KPRI “KEBAK” belum sepenuhnya dicantumkan dalam laporan neraca yang disajikan oleh KPRI “KEBAK” seperti tanah dan gedung. Tanah dan gedung merupakan komponen aset tetap yang seharusnya dicantumkan dalam laporan neraca.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Dari uraian tersebut diatas penulis merumuskan masalah yang dibahas adalah sejauh mana implementasi SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan pada KPRI KEBAK Purworejo ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan SAK ETAP dalam membuat laporan keuangan di koperasi setelah adanya pencabutan PSAK no. 27

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **II.1 Pengertian Koperasi**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian pasal 1 menyebutkan bahwa :“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK 2009: PSAK 27) : “Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

### **II.2 Prinsip Koperasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 6 prinsip koperasi meliputi:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota.

### **II.3 Fungsi dan Peran Koperasi**

Fungsi dan peran koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 pasal 4 adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

### **II.4 Pengertian SAK ETAP**

SAK ETAP (IAI:2009, hal.1, par.1.1) menyebutkan bahwa SAK ETAP adalah standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

1. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal, atau
2. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

## II.5 Manfaat SAK ETAP

Menurut SAK ETAP (IAI:2009) manfaat diberlakukannya SAK ETAP adalah:

1. Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri, dapat diaudit dan mendapatkan opini audit, sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha.
2. Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya.
3. Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

## II.6 Perbedaan SAK ETAP dengan PSAK – IFRS

Perbedaan antara SAK ETAP dengan PSAK – IFRS adalah sebagai berikut:

1. Materi SAK ETAP lebih sederhana sedangkan PSAK –IFRS *complicated* dan rumit.
2. SAK ETAP cenderung menggunakan basis *stewardship* sebagai pertanggungjawaban pengelola kepada *stakeholder* sehingga cenderung menggunakan prinsip *reliability*, sedangkan PSAK – IFRS telah bergeser untuk pemenuhan *user* dalam pengambilan keputusan sehingga cenderung menggunakan prinsip relevan.

Perbedaan pokok SAK ETAP dengan PSAK – IFRS adalah:

1. SAK ETAP tidak mengatur pajak tangguhan
2. SAK ETAP hanya menggunakan metode tidak langsung untuk laporan arus kas.
3. SAK ETAP menggunakan *cost* model untuk investasi ke asosiasi dan menggunakan metode ekuitas untuk anak perusahaan.
4. SAK ETAP tidak secara penuh menggunakan PSAK 50/55.

SAK ETAP hanya menggunakan model *cost* untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan properti investasi. PSAK – IFRS boleh memilih *cost* model atau model revaluasi

## **II.7 Pengertian Laporan Keuangan**

Menurut Munawir (2010: 2) mengatakan laporan keuangan adalah “Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.”

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas”. Jadi, laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dimana didalamnya terdapat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada tahun buku yang bersangkutan. (SAK:2009, PSAK No.1, h.5, par.9),

## **II.8 Tujuan Laporan Keuangan**

SAK ETAP (IAI:2009, h.2, par.2.1) menyatakan “ Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu”.

## **II.9 Komponen Laporan Keuangan**

Menurut SAK ETAP (IAI:2009, h.17, par.3.12), laporan keuangan entitas meliputi:

1. Neraca
2. laporan laba rugi
3. laporan perubahan ekuitas yang juga menunjukkan:
  - a. seluruh perubahan dalam ekuitas, atau
  - b. perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik;
4. laporan arus kas; dan
5. catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

## **III. METODOLOGI PENELITIAN**

### **III.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus. Pendekatan kualitatif merupakan suatu paradigma penelitian untuk mendeskripsikan peristiwa, perilaku orang atau suatu keadaan pada tempat tertentu secara rinci dan mendalam dalam bentuk narasi. Studi kasus menurut Bogdan dan Bikien (1982) merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu.

### **III.2. Lokasi Penelitian**

Penelitian mengambil lokasi di KPRI Kebak, kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo.

### **III.3. Jenis Data Penelitian**

Jenis data yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah bersifat skematik, narasi dan uraian juga penjelasan data dari informan baik lisan maupun data dokumen yang tertulis, perilaku subyek yang diamati di lapangan juga menjadi data dalam menumpulkan hasil penelitian ini, dan dapat di deskripsikan sebagai berikut :

- a. Rekaman audio.
- b. Catatan lapangan.
- c. Dokumentasi.
- d. Foto.

### **III.4 Sumber Data Penelitian**

- a. Unsur manusia sebagai instrumen kunci yaitu peneliti yang terlibat langsung dalam observasi partisipasi, unsur informan terdiri dari Kepala Disperindagkop Kabupaten Purworejo, pengawas koperasi, ketua koperasi dan bendahara koperasi
- b. Unsur non manusia sebagai data pendukung penelitian.

### **III.5 Teknik Mendapatkan Sampel**

*Purposive sampling*

*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. *Purposive sampling* juga bisa berarti sampling yang menentukan target kelompok tertentu. Dalam penelitian ini kriteria yang memenuhi sebagai *purposive sampling* adalah: KPRI yang sudah pernah mendapat sosialisasi dan pelatihan

SAK ETAP.

### **III.6 Teknik Pengumpulan Data**

a. Observasi ke koperasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.

b. Wawancara.

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab

c. Studi dokumentasi, terutama mengenai akurasi sumber dokumen.

### **III.7 Teknik Analisis Data**

Menurut Miles & Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009) analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

### **III.8 Keabsahan Data**

Menurut Moleong (2011), setidaknya ada tiga cara untuk mendapatkan keabsahan data kualitatif, yaitu:

1. Teknik pemeriksaan derajat kepercayaan (*credibility*), teknik ini dapat dilakukan dengan cara:
  - a. Keikutsertaan peneliti sebagai instrumen
  - b. Ketekunan pengamatan
  - c. *Triangulasi*
  - d. Kecukupan referensial
2. Teknik pemeriksaan keteralihan (*transferability*), dilakukan dengan cara uraian terinci.
3. Uji dependabilitas/teknik pemeriksaan ketergantungan.



#### IV. PEMBAHASAN

##### IV.A. Gambaran singkat KPRI KEBAK

KPRI KEBAK berdiri pada tahun 1959 dan secara resmi tercatat di jawatan koperasi pada tahun 1961. Keanggotaan KPRI “KEBAK” sampai tahun 2013 adalah 352 anggota terdiri dari guru- guru dari beberapa Sekolah Dasar (SD) yang berada di daerah Kemiri serta beberapa pegawai kantor UPT P dan K Kemiri. Selama 6 hari penulis mengali informasi tentang laporan keuangan yang ada. Laporan keuangan yang ada adalah neraca dan laporan laba rugi, data ini disusun tidak berdasar SAK ETAP. Penulis berusaha untuk memberikan kontribusi dengan mengajukan usulan menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP dengan data yang tersedia di KPRI tersebut.

##### 4.B. Laporan Keuangan KPRI KEBAK

Di bawah ini adalah data neraca dan laporan laba rugi milik KPRI KEBAK yang akan dianalisa oleh penulis.

#### NERACA KOMPARATIF

##### ASET

No	REKENING	TAHUN BUKU 2011	TAHUN BUKU 2012
<b>I</b>	<b>HARTA LANCAR</b>		
	1. Kas	202.417.909,34	3. 109.041,34
	2. Piutang	1.761.819.819,50	2.340.398.569,50
	Jumlah Harta Lancar	1.964.237.728,84	2.343.507.610,84
<b>II</b>	<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
	1. Simpanan Pokok di PKP-RI	100.000,00	100.000,00
	2. Simpanan Wajib di PKP-RI	82.837.968,90	96.013.968,90
	3. Simpanan Lain-lain di PKP-RI	735.366,83	735.366,83
	4. Simpanan di IKP-RI	711.000,00	711.000,00
	5. Dana di IKP-RI	11.550,00	11.550,00
	6. Dana di GKP-RI	11.550,00	11.550,00
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	84.407.435,73	97.583.435,73
<b>III</b>	<b>HARTA TETAP</b>		
	1. Investaris	68.829.987,37	68.829.987,37
	Jumlah Harta Tetap	68.829.987,37	68.829.987,37

	<b>JUMLAH HARTA</b>	<b>2.117.475.151,94</b>	<b>2.509.921.033,94</b>
--	---------------------	-------------------------	-------------------------

**KEWAJIBAN DAN EKUITAS**

<b>No</b>	<b>REKENING</b>	<b>TAHUN BUKU 2011</b>	<b>TAHUN BUKU 2012</b>
<b>I</b>	<b>HUTANG LANCAR</b>		
	1. Dana Pengurus	397.907,17	398.528,53
	2. Dana Karyawan	143.690,12	143.897,33
	3. Dana Pendidikan	11.727.950,63	13.573.074,97
	4. Dana Sosial	4.020.251,46	4.635.292,90
	5. Dana Pembangunan perkoperasian	5.899.841,15	6.245.882,59
	6. Ongkos Administrasi Organisasi	44.606.349,00	54.139.849,00
	Jumlah Hutang Lancar	66.795.989,53	79.136.525,32
<b>II</b>	<b>HUTANG JANGKA PANJANG</b>		
	1. Hutang		120.333.000,00
	2. Simpanan Kesra Purna Guna	78.251.205,00	124.965.305,00
	Jumlah Hutang Jangka Panjang	78.251.205,00	245.298.305,00
<b>III</b>	<b>MODAL SENDIRI</b>		
	1. Simpanan Pokok	1.800.000,00	1.760.000,00
	2. Simpanan Wajib Bulanan	1.132.582.100,00	1.272.399.100,00
	3. Simpanan Wajib Kredit	161.658.050,00	169.194.550,00
	4. Simpanan Khusus	48.139.500,00	45.320.950,00
	5. Pemupukan Modal Kerja	31.837.427,20	31.837.427,20
	6. Cadangan Modal	178.433.826,38	193.809.862,43
	7. Akumulasi Susutan Inventaris	58.721.194,50	64.187.406,50
	8. Cadangan Inventaris	5.322.054,00	5.322.054,00
	9. Simpanan Persediaan Gedung	893.862,50	893.862,50
	10. Simpanan Lain-lain Anggota	26.367.313,10	25.351.063,10
	11. Gaji ke-13	711.000,00	711.000,00
	12. Simpanan Gedung Anggota	9.964.000,00	9.677.000,00
	13. Dana Resiko Kredit Anggota	240.991.425,00	289.506.675,00
	14. SHU Anggota Penyimpan	1.150,75	1.184,32
	15. SHU Anggota Berjasa		33,57
	16. SHU Berjalan	75.005.054,00	75.514.035,00
	17. PPh Pasal 25		
	Jumlah Harta Tetap	1.972.427.957,43	2.185.486.203,62
	<b>JUMLAH HARTA</b>	<b>2.117.475.151,94</b>	<b>2.509.921.033,94</b>

Perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun 2012 sebagai berikut:

1. Pendapatan pada tahun 2012

Dari Kredit Uang	Rp 313.889.570,00
Dari Kredit Barang	Rp 3.538.550,00

Dari SHU PKP RI Purworejo	Rp 682.880,00
Jumlah Pendapatan	Rp 318.111.000,00
2. Biaya Operasional pada tahun 2012	
Biaya Operasional	Rp 133.006.850,00
Biaya Administrasi	Rp 2.300.150,00
Dari Biaya Usaha	Rp 29.789.965,00
Pengadaan Pakaian Kerja	Rp 77.500.000,00
Jumlah Pengeluaran	Rp 242.596.965,00
Jadi Pendapatan sisa hasil usaha yang dicapai tahun 2012 adalah:	
1. Pendapatan	Rp 318.111.000,00
2. Pengeluaran	Rp 242.596.965,00
Sisa Hasil Usaha (SHU)	Rp 75.514.035,00
Pajak Progresif 18%	Rp 13.592.530,00
Besar SHU yang dikelola KPRI “KEBAK”	Rp 61.921.505,00

#### 4.C. Analisa Data

Secara ringkas hasil analisa penulis dapat disampaikan sebagai berikut :

##### 1. Aset

Total aset yang dimiliki KPRI “KEBAK” pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 2.509.921.033,94 jumlah tersebut terdiri dari harta lancar, investasi jangka panjang, dan harta tetap. Dalam SAK ETAP bab 2 aset dapat diakui jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Dengan demikian transaksi tersebut dapat diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi.

##### 2. Aset Tetap

Dalam laporan neraca komparatif KPRI “KEBAK” diketahui bahwa aset tetap yang dimiliki oleh KPRI “KEBAK” pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 68.829.987,37 yang terdiri dari inventaris yaitu non bangunan, bangunan, dan tanah. Bab 15 SAK ETAP tentang aset tetap

menyebutkan bahwa suatu entitas harus menerapkan kriteria dalam menentukan pengakuan aset tetap. Oleh karena itu, entitas harus mengakui biaya perolehan aset tetap sebagai aset tetap. Dalam SAK ETAP par.15.5 juga menyebutkan bahwa tanah dan bangunan adalah aset yang dapat dipisahkan dan harus dicatat secara terpisah, meskipun tanah dan bangunan tersebut diperoleh secara bersamaan. Entitas juga harus mengalokasikan jumlah aset yang dapat disusutkan secara sistematis selama umur manfaatnya. Beberapa metode penyusutan aset tetap yang mungkin dipilih, antara lain metode garis lurus (*straight line method*), metode saldo menurun (*diminishing balance method*), dan metode jumlah unit produksi (*sum of the unit of production method*). Besarnya biaya penyusutan harus diakui dalam laporan laba rugi.

Pada saat pengakuan awal, aset tetap harus diukur sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap adalah setara harga tunai pada tanggal pengakuan. Jika pembayaran ditangguhkan lebih dari waktu kredit normal, maka biaya perolehan adalah nilai tunai semua pembayaran masa yang akan datang. Unsur biaya perolehan meliputi harga beli, biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung sampai kondisi aset tetap siap digunakan sesuai dengan maksud manajemen, dan estimasi awal biaya pembongkaran aset, biaya pemindahan aset, serta biaya restorasi lokasi. Sedangkan biaya administrasi, biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari (*cost of day-to-day servicing*) dari aset tetap harus diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya. Entitas juga harus mengukur seluruh aset tetap setelah pengakuan awal pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

### **3.Kewajiban**

Kewajiban KPRI “KEBAK” Kemiri dalam laporan neraca komparatif pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 245.298.305,00. Yaitu terdiri dari hutang lancar sebesar Rp 79.136.525,32 dan hutang jangka panjang sebesar Rp 245.298.305,00. Dalam SAK ETAP bab 2

menyebutkan bahwa kewajiban dapat diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal.

#### **4. Ekuitas**

SAK ETAP bab 19 tentang ekuitas menyatakan bahwa ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundangan dan akta pendirian yang berlaku. Ekuitas yang dimiliki KPRI “KEBAK” pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 2.185.486.203,62, terdiri dari berbagai simpanan anggota yaitu simpanan pokok, simpanan wajib bulanan, cadangan modal, Sisa Hasil Usaha (SHU), dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan isi SAK ETAP bab 19 bahwa modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama, tak dapat dipindahtangankan dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Ekuitas menurut SAK ETAP tidak mengakui adanya akumulasi susutan inventaris seperti halnya dalam laporan keuangan yang disajikan oleh KPRI “KEBAK” Kemiri. Akumulasi susutan diakui serta disajikan dalam laporan neraca sebagai elemen dari aset tetap.

#### **5. Pendapatan**

Pendapatan KPRI “KEBAK” Kemiri pada tahun 2012 adalah sebesar Rp 318.111.000,00 berasal dari berbagai sumber yaitu dari kredit uang sebesar Rp 313.889.570,00, dari penjualan kredit barang di unit pertokoan sebesar Rp 3.538.550,00 serta dari SHU PK PRI Purworejo sebesar Rp 682.880,00

Pendapatan suatu entitas menurut SAK ETAP bab 20 muncul sebagai akibat dari transaksi atau kejadian berikut:

1. Penjualan barang (baik diproduksi oleh entitas untuk tujuan produksi atau dibeli untuk dijual kembali)
2. Pemberian jasa
3. Kontrak instruksi
4. Penggunaan aset entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti atau deviden.

Menurut SAK ETAP suatu entitas harus mengukur pendapatan berdasarkan nilai wajar atas pembayaran yang diterima atau masih harus diterima. Nilai wajar tersebut tidak termasuk diskon penjualan dan potongan volume. Entitas juga harus memasukkan pendapatan manfaat ekonomi yang diterima atau masih harus diterima secara bruto. Sedangkan nilai yang menjadi hak pihak ketiga seperti pajak penjualan, pajak atas barang dan jasa harus dikeluarkan dari pendapatan.

## **6. Beban**

Beban pada perhitungan Sisa Hasil Usaha (SHU) pada tahun 2012 di KPRI “KEBAK” Kemiri adalah sebesar Rp 242.596.965,00. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai beban operasional yaitu sebesar Rp 133.006.850,00, beban administrasi Rp 2.300.150,00, dan beban usaha Rp 29.789.965,00 serta dari pengadaan pakaian kerja sebesar Rp 77.500.000,00.

Dalam SAK ETAP bab 2 menyebutkan bahwa pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban dapat diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

Dari analisis tersebut diatas maka dapat penulis sajikan penyusunan neraca dan laporan laba rugi sebagai berikut :

KPRI "KEBAK" PURWOREJO  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2012  
(Dinyatakan dalam Rupiah)

No	ASET	TAHUN BUKU 2012
<b>I</b>	<b>ASET LANCAR</b>	
	3. Kas	3.109.041,34
	4. Piutang	2.340.398.569,50
	Jumlah Aset Lancar	2.343.507.610,84
<b>II</b>	<b>ASET TIDAK LANCAR</b>	
	1. Simpanan Pokok di PKP-RI	100.000,00
	2. Simpanan Wajib di PKP-RI	96.013.968,90
	3. Simpanan Lain-lain di PKP-RI	735.366,83
	4. Simpanan di IKP-RI	711.000,00
	5. Dana di IKP-RI	11.550,00
	6. Dana di GKP-RI	11.550,00
	7. Inventaris (setelah dikurangi akumulasi susutan inventaris Rp 64.187.406,50)	4.642.580,87
	Jumlah Aset Tidak Lancar	97.583.435,73
	<b>TOTAL ASET</b>	<b>2.445.733.627,44</b>

No	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	TAHUN BUKU 2012
<b>I</b>	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	
	7. Dana Pengurus	398.528,53
	8. Dana Karyawan	143.897,33
	9. Dana Pendidikan	13.573.074,97
	10. Dana Sosial	4.635.292,90
	11. Dana Pembangunan perkoperasian	6.245.882,59
	12. Ongkos Administrasi Organisasi	54.139.849,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	79.136.525,32
	3. Hutang	120.333.000,00
	4. Simpanan Kesra Purna Guna	124.965.305,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	245.298.305,00
	18. Simpanan Pokok	1.760.000,00
	19. Simpanan Wajib Bulanan	1.272.399.100,00
	20. Simpanan Wajib Kredit	169.194.550,00
	21. Simpanan Khusus	45.320.950,00
	22. Pemupukan Modal Kerja	31.837.427,20

23. Cadangan Modal	193.809.862,43
24. Cadangan Inventaris	5.322.054,00
25. Simpanan Persediaan Gedung	893.862,50
26. Simpanan Lain-lain Anggota	25.351.063,10
27. Gaji ke-13	711.000,00
28. Simpanan Gedung Anggota	9.677.000,00
29. Dana Resiko Kredit Anggota	289.506.675,00
30. SHU Anggota Penyimpan	1.184,32
31. SHU Anggota Berjasa	33,57
32. SHU Berjalan	75.514.035,00
33. PPh Pasal 25	
Jumlah Ekuitas	2.121.298.797,12

**KPRI “KEBAK” PURWOREJO**  
**PERHITUNGAN HASIL USAHA**  
**PER 31 DESEMBER 2012**  
**(Dinyatakan dalam Rupiah)**

<b>PENDAPATAN:</b>		
Kredit Uang	313.889.570,00	
Kredit Barang	3.538.550,00	
SHU PKP-RI Purworejo	682.880,00	
Total Pendapatan		318.111.000,00
<b>BEBAN-BEBAN:</b>		
Beban Operasional	133.006.850,00	
Beban Administrasi	2.300.150,00	
Beban Usaha	29.789.965,00	
Pengadaan Pakaian Kerja	77.500.000,00	
Total Beban		242.596.965,00
<b>Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak</b>		<b>75.514.035,00</b>
Taksiran Pajak		13.592.530,00
<b>Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak</b>		<b>61.921.505,00</b>



## V. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan KPRI “KEBAK” Kemiri maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penempatan akun akumulasi susutan inventaris belum sesuai dengan SAK ETAP. Akun akumulasi susutan inventaris ditempatkan menurut SAK ETAP dalam komponen aset tetap.
2. Penggunaan istilah pos-pos laporan keuangan belum sesuai dengan SAK ETAP. Dalam neraca KPRI “KEBAK” Kemiri digunakan istilah aktiva, pasiva, hutang, dan modal sedangkan SAK ETAP menggunakan istilah aset, kewajiban, ekuitas.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2000. *Intermediate Accounting*. Yogyakarta:BPFE.
- Bogdan R.C., & Biklen, S.K. 1982. *Qualitative research for education: An Introduction to theory and methods*. Boston Allyn and Bacon Inc.
- Danie Schutte & Pieter.2011. *A Comparative Evaluation of South African SME financial against the IFRS requirements* (online) <http://www.academicjournals.org>.
- Fahmi, Irham. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung:Alfabeta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta:Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2009 *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Jakarta:Salemba empat
- Munawir. 2010. *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta:Liberty.
- Moloeng, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Bandung.
- Narsa I Made, Agus Widodo, Sigit Kurnianto.2012. *Mengungkap Kesiapan UMKM Dalam Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (PSAK-ETAP) Untuk Meningkatkan Akses Modal Perbankan*, Majalah Ekonomi Tahun XXIII

- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Bandung:Citra Umbara.
- Republik Indonesia. 2012. *Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian*. Bandung:Fokus Media.
- Satori, Djaman dan Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.Bandung
- Suhairi dan Wahdini 2007, *Persepsi Akuntan terhadap overload Standar Akuntansi Keuangan bagi usaha kecil dan menengah* makalah yang disampaikan pada SNA IX Padang.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.